

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno,1994). Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Lincolin (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi adalah masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB)

bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 1994 : 456).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Proses produksi barang dan jasa itu dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain (Sukirno,2012: 61). Terjadinya kenaikan atau penurunan PDB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Terjadinya kenaikan PDB menunjukkan kegairahan ekonomi suatu negara karena ekonomi di negara tersebut telah bergerak dan berekspansi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam mendongkrak pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang madani dan sejahtera yang bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan Handoko, 2005).

Disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Pembangunan ekonomi ini mempunyai tiga sifat penting, yang *pertama* adalah suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus. *Kedua*, suatu usaha untuk menaikkan pendapatan per jiwa/*income per kapita*. *Ketiga*, adalah kenaikan *income per kapita* itu harus terus-menerus dan pembangunan itu dilakukan sepanjang masa (Hasibuan, 1987).

Pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh tiap-tiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sama halnya

dengan PDB, yang menjadi tolok ukur nilai PDRB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. Nilai PDRB inilah yang akan menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi *supply* mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi yang ada di suatu wilayah. Dalam jangka pendek, *supply* ini ada untuk memenuhi *demand*. Karena itu dari sisi *demand*, PDRB adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi yang ada di suatu wilayah, baik untuk kepentingan konsumsi rumah tangga dan investasi swasta maupun belanja pemerintah. Bila *supply* berlebih, kelebihanannya digunakan untuk memenuhi permintaan luar daerah/luar negeri. Sebaliknya bila kurang, dipenuhi melalui impor dari luar daerah/luar negeri.

Tabel 1.1.
Nilai PDRB di Pulau Jawa dari 33 Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014

Provinsi	PDRB ADHK 2000	Kontribusi
DKI Jakarta	477.285.245,38	17,93%
Jawa Barat	386.838.839,6	14,54%
Banten	105.856.068,16	3,98%
Jawa Tengah	223.099.740,34	8,38%
DI Yogyakarta	24.567.476,12	0,92%

Jawa Timur	419.428.445,69	15,76%
Pulau Jawa	1.637.075.815,39	57,99%
33 Provinsi di Indonesia	2.661.070.761,64	100%

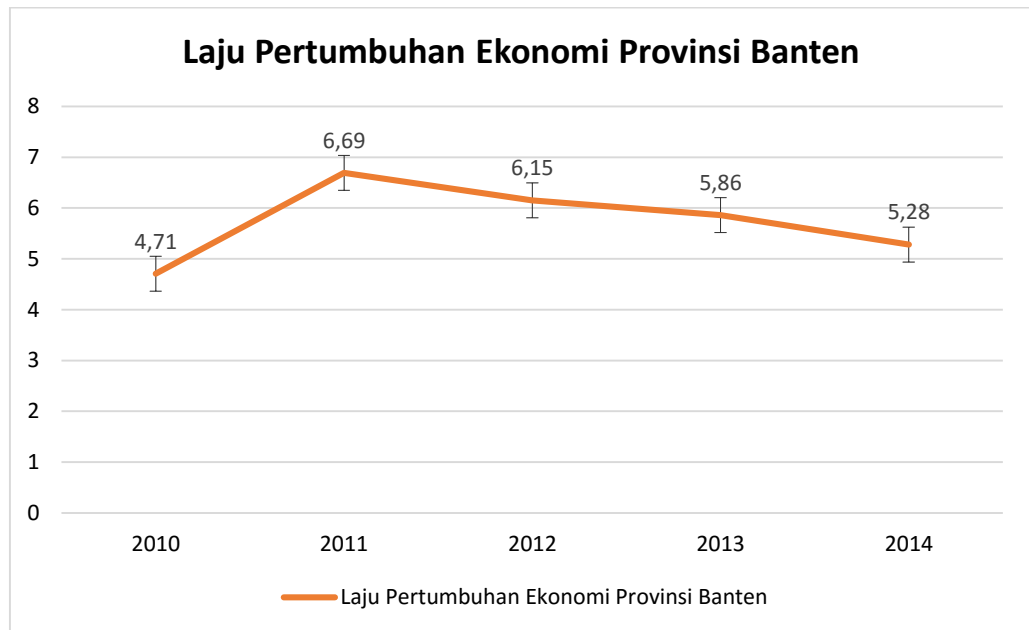
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Tabel 1.1. di atas menjelaskan kontribusi PDRB di Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pulau Jawa memiliki kontribusi terbesar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kontribusi terbesar di Pulau Jawa yaitu sebesar 17,93% yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta, sedangkan kontribusi terendah sebesar 0,92% yang dicapai oleh DIY dan Provinsi Banten sendiri sebesar mendapatkan 3,98%. Minimnya kontribusi Provinsi Banten dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi secara nasional dikarenakan Banten masih dalam tahap perkembangannya pada sektor industri dan jasa-jasa sehingga tidak banyak aktivitas ekonomi yang berskala besar seperti Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya perekonomian Provinsi Banten cukup baik apabila di sandingkan dengan provinsi yang lain di Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 9.163 km² yang terbagi ke dalam 8 wilayah administratif kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan terakhir Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten dengan posisi geografis yang strategis sangat mendukung perkembangan pada kegiatan ekonomi daerahnya dikarenakan Banten sendiri memiliki sumber daya yang berkecukupan dari alam maupun manusia. Dari tahun 2013-2014 rata-rata perekonomian Banten tumbuh sebesar 5,83% pertahun, sedikit dibawah angka rata-rata pertumbuhan

ekonomi nasional (PDRB 33 provinsi) kontribusi PDRB Provinsi Banten dalam pembentukan output nasional sebesar 3,98% (**Tabel 1.1.**).

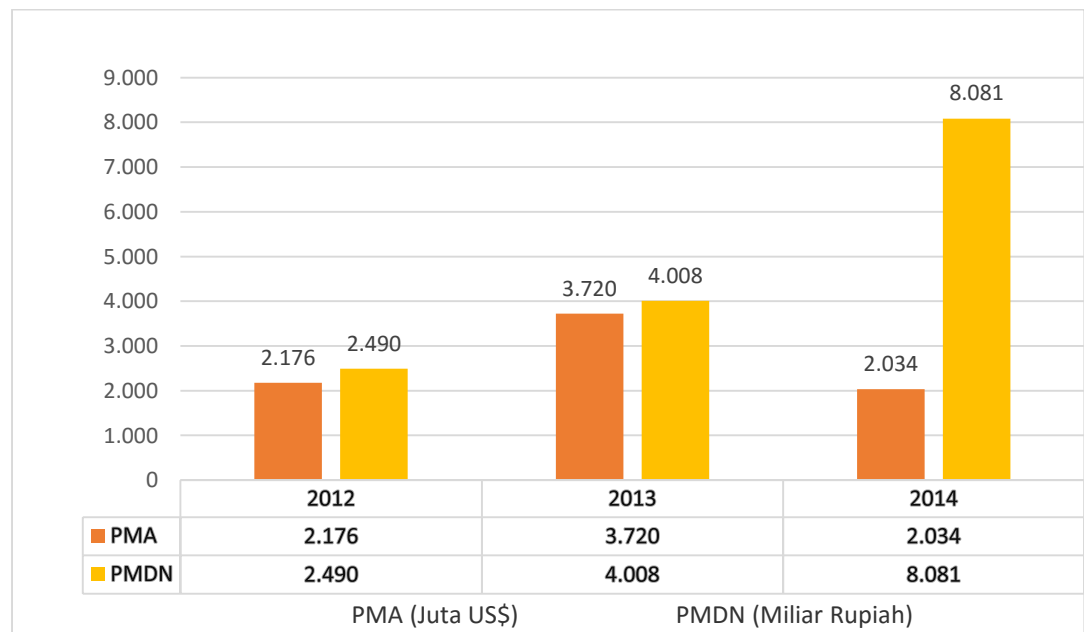
Dari sisi besarnya perekonomian Provinsi Banten menduduki terendah ke 2 setelah Provinsi DIYogyakarta dalam lingkup Pulau Jawa dan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi Banten di kategorikan baik apabila dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Struktur perekonomian Provinsi Banten di dominasi oleh sektor industri pengolahan di susul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor industri pengolahan menyumbang sebesar 45,58% dan sektor perdagangan sekitar 19,42%. Sektor industri memang menjadi salah satu sektor keunggulan terbesar yang ada di Provinsi Banten yang banyak tersebar di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Apalagi Provinsi Banten terkenal dengan industri transportasi udara dan laut seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terluas di Indonesia serta Pelabuhan Merak yang aktivitas ekonominya terus bergerak.



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2015

Gambar 1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2010-2014

Pada **Gambar 1.1.** Diatas menerangkan laju pertumbuhan ekonomi provinsi banten dari tahun 2010-2014 dibilang cukup baik di karnakan bisa tumbuh di atas 5% dimana dari tahun 2010-2011 mengalami kenaikan sebesar 1,98% akan tetapi di tahun berikutnya (2011-2014) justru mengalami penurunan di setiap tahunnya, tentu banyak kendala dan hambatan yang di hadapi di setiap tahunnya seperti halnya di tahun 2014 yang terjadi cenderung lebih lambat di bandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan adanya ketidakpastian kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan dari sisi domestik menyebabkan kenaikan biaya ongkos produksi dan harga komoditas sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Akibatnya hanya tumbuh sebesar 5,28%.



Sumber : BKM RI, 2015

Gambar 1.2.
Realisasi Nilai Investasi di Provinsi Banten tahun 2012-2014

Gambar 1.2. diatas menunjukkan realisasi nilai investasi penanaman modal asing (PMA) dari tahun 2012-2014 mengalami fluktuatif, artinya dari tahun 2012-2013 mengalami kenaikan dan kemudian turun pada tahun 2014 dari 2.716 (juta US\$) naik menjadi 3.720 (juta US\$) dan kemudian turun menjadi 2.034 (juta US\$). Adapun dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Banten sendiri disetiap tahunnya justru mengalami kenaikan tahun 2012-2014 dari 2.490 (miliar rupiah) menjadi 4.008 (miliar rupiah) dan memingkat tajam sebesar 8.081 (miliar rupiah). Provinsi Banten sendiri memang menjadi lahan para investor untuk menanamkan modalnya karena Provinsi Banten memiliki berbagai infrastruktur strategis dalam bidang transportasi seperti pelabuhan merak dan ciganding serta bandara internasional

Soekarno-Hatta dan juga akses yang mudah menuju pelabuhan internasional Tanjung Perak melalui tol (BPS, 2014).

Selain investasi sendiri Provinsi Banten juga memiliki faktor lain yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi adalah kualitas tenaga kerja. Pada sektor ketenagakerjaan yang dimana merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Tabel 1.2.
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014 (jiwa)

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014	Perubahan
1	Pertanian	717.535	712.079	-5.456
2	Pertambangan	20.897	47.687	26.790
3	Industri	863.269	1.088.392	225.123
4	Listrik, Gas, Air	12.334	18.323	5.989
5	Bangunan	153.951	243.698	89.747
6	Perdagangan, dll	984.513	1.266.512	281.999
7	Telekomunikasi, dll	354.674	325.286	-29.388
8	Keuangan	105.460	297.410	191.950
9	Jasa-Jasa, dll	602.082	938.706	336.624
	Total	3.814.715	4.938.093	1.123.378

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2015

Dari **Tabel 1.2.** di atas dapat di lihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di Provinsi Banten bekerja pada sektor perdagangan dan disusul pada sektor industri kemudian sektor jasa-jasa . Jumlah orang yang bekerja di provinsi banten sendiri hingga tahun 2014 tercatat sekitar 4.938.093 jiwa dan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja di Provinsi Banten. Dari tahun 2010-2014 angkatan kerja mengalami kenaikan 1.123.378 jiwa, tercatat sektor perdagangan adalah penyumbang ekonomi terbesar saat ini di provinsi banten di karenakan sebanyak 1.266.512 jiwa bekerja pada setor tersebut dan susul oleh sektor industri sebanyak 1.088.392 jiwa. Akan tetapi perubahan angkatan kerja di Provinsi Banten sendiri cenderung fluktuatif di setiap tahunnya khususnya sektor pertanian yang dimana lahan untuk bertani

sudah mulai berkurang setiap tahunnya untuk di jadikan lahan industri dan juga pada sektor komunikasi dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja.

Peranan sektor perdagangan di Provinsi Banten sangatlah dominan, hal ini terlihat dari kontribusinya yang menyumbang hampir sebagian dari PDRB Provinsi Banten setiap tahunnya. Pertumbuhan yang tinggi pada sektor perdagangan tersebut pada satu sisi dapat menyediakan lapangan pekerjaan cukup besar sehingga mampu menekan angka pengangguran. Tetapi pada sisi lain hal itu bisa menjadi ancaman bagi sektor lain, terutama pertanian, di mana proses regenerasi profesi pertanian akan terganggu. Apalagi pertanian merupakan salah satu sektor potensial yang menjadi tumpuan pendapatan masyarakat Provinsi Banten.

Pertumbuhan ekonomi regional sendiri tidak bisa lepas dari peran pemerintah dalam hal belanja. Pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah. (Wibisono, 2003) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi (Syafii, 2009).

Tabel 1.3.
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Banten (Juta Rupiah) 2013 -2014

Uraian	2013	2014
1. Pendapatan Daerah	6.230.229,81	7.068.432,91
Pendapatan Asli Daerah	4.118.551,72	4.899.125,74
Dana Perimbangan	1.126.004,17	1.159.872,63
Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah /	985.673,92	1.009.434,54
2. Belanja Daerah	5.295.139,15	6.192.155,57
Belanja Langsung	3.316.069,66	4.013.607,70
Belanja Tidak Langsung	1.979.069,49	2.178.547,86
3. Surplus(Defisit)	935.090,66	876.277,34
4. Pembiayaan Daerah	134.714,20	1.031.716,86
Penerimaan Pembiayaan Daerah	450.814,20	169.804,86
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	316.100,00	38.088,00
5. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenan	1.069.804,86	1.907.994,21

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2015

Pada **Tabel 1.3.** dapat dilihat tahun anggaran 2014, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Banten mencapai 7,07 triliun rupiah, sementara belanja daerah Pemerintah Provinsi Banten mencapai 6,19 triliun rupiah. Pada tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar Pemerintah Provinsi Banten yaitu sebesar 4,90 triliun rupiah atau memberi kontribusi sekitar 69,31 persen dari total penerimaan. Untuk belanja

daerah, porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 4,01 triliun rupiah atau 69,31 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya sebanyak 2,18 triliun (35,18%) digunakan untuk belanja langsung. Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Banten sendiri pada tahun 2014 mencapai 24,64 triliun rupiah atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 21,52 triliun rupiah, dan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 34,69 triliun rupiah pada tahun 2015

Peran pemerintah sendiri sangatlah penting untuk di daerah yang relatif kurang berkembang, seperti halnya Kabupaten Lebak dan Kota Serang yang dimana daerah ini cenderung lebih lambat di bandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di provinsi banten di mana tingkat investasi swasta masih rendah dan kurangnya tenaga kerja yang bekerja di daerah tersebut. Karena di daerah tersebut kebanyakan di dominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan. Pada tahun 2014 sendiri perekonomian Provinsi Banten masih di topang oleh Kota Tangerang Selatan, Cilegon dan Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat di pahami di karenakan struktur ekonomi di Provinsi banten terpusat pada daerah tangerang yang di dominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,48% adapun Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang masing-masing tercatat 5,91% dan 5,34%. Pada daerah ini investasi pemerintah sangat diharapkan dapat meningkatkan daya tarik melalui pembangunan infrastruktur wilayah guna mempercepat laju perekonomian seperti akses jalan, listrik, irigasi, dan sarana

prasarana umum, transportasi dan lainnya. Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Provinsi Banten tidak lepas dari kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Sementara itu PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten di pengaruhi oleh beberapa factor seperti Tenaga Kerja, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah di masing-masing daerah. Banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan variable yang sama seperti penelitian Fitrah Afrizal (2013) dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan”

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji dan mendalami serta menganalisis lebih dalam. Dalam bentuk proposal dengan judul **“Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Mengingat ruang lingkup pertumbuhan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah dengan melihat seberapa besar pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Dengan faktor-faktor yang membatasi dengan pengeluaran pemerintah, investasi meliputi

PMDN dan PMA, dan tenaga kerja yang sudah bekerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB dengan harga konstan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2010-2014.
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2010-2014.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2010-2014.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2010-2014.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2010-2014.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2010-2014.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kiranya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai gambaran bagi pemerintah provinsi tentang pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka penentuan arah, kebijakan serta pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
2. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai besarnya pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten.